

MANA KECOCOKKAN FOTOCOPY DENGAN SURAT ASLI
Nomor: 709 /PKFDSA/Not-MH/MV/2018
Mengesahkan Fotocopy yang telah di cocokkan
dengan surat aslinya, oleh saya, MANAHAN
HARAHAP, Sarjana Hukum, ~~Magister Kenotariatan~~,
Notaris di Kota Padang Sidempuan.

Padang Sidempuan,

18 APR 2018

Ing Sidempuan

Halaman 1 dari 3 halaman



NOTARIS

MANAHAN HARAHAP, SH, M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

No. AHU - 505.AH.02.01. Tahun 2012

Tgl. 26 Desember 2012

No. 247 Tanggal. 11 April 2018

AKTA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN "PENDIDIKAN ARROHM"

PIHAK I :
-Tuan Doktorendus PARLUATAN SIREGAR

-Tuan HUSIN SIREGAR

-Tuan ARWANDI SIREGAR

PIHAK II : Nyonya MASBOTTO NASUTION

-Tuan BAHMAN HARAHAP

Kantor / Rumah :

Jl. Wage Rudolf Supratman No. 08 H Padangsidempuan

Telp. (0634) 22216

KANTOR NOTARIS / PPAT
MANAHAN HARAHAP, SH., M.Kn.
Jln. Wage Rudolf Supratman No. 08 H
PADANG SIDIMPUAN



**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"PENDIDIKAN ARROHIM"**

Nomor : 247

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 (sebelas) April----
2018 (dua ribu delapan belas).-----
-Jam 09.15 WIB (sembilan lewat lima belas menit----
Waktu Indonesia bagian Barat).-----
-Hadir dihadapan saya, **MANAHAN HARAHAP, Sarjana----**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-----
Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,---
Tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu--
dua belas) Nomor : AHU - 505.AH.02.01.Tahun 2012,---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal, dan akan disebutkan pada akhir akta ini:-----
di Padangsidimpuan.-----

1. -**Tuan Doktorandus PARLUATAN SIREGAR, Magister-----**
Hukum, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 05-
(lima) Februari 1966 (seribu sembilan ratus enam--
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan---
Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Jl.---
Karya Bakti No 90-B Lk VII, Kelurahan/Desa-----
Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor,-----
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271110502660003,---
untuk sementara berada di Kota Padangsidimpuan.---

2. -**Tuan HUSIN SIREGAR, Sarjana Ekonomi, lahir di----**
Poken Jior, pada tanggal 04 (empat) Juni 1984-----
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat-
tinggal di Joring Natobang, Rukun Teranga 000,---
Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Joring Natobang,--
Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota-----
Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1277060406840001.-----

3. -**Tuan ARWANDI SIREGAR, lahir di Poken Jior, pada**



tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Poken Jior, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Joring Natobang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1277062906870001.

4. **-Nyonya MASROITO NASUTION**, lahir di Joring Lombang, pada tanggal 14 (empat belas) Oktober 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Joring Lombang, Kelurahan/Desa Joring Natobang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1277065410870001.

5. **-Tuan BAHKAN HARAHAP**, lahir di Mompang, pada tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mompang, Rukun Tetangga 094, Kelurahan/Desa Mompang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1277061907770001.

--Para penghadap memperkenalkan diri kepada saya, Notaris dan saksi-saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir akte ini:

-Penghadap dalam tindakan tersebut menerangkan bahwa sebagai pendiri telah mengumpulkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka, telah mendirikan suatu Yayasan dengan peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut:





NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. -Yayasan ini bernama: "YAYASAN PRNDIDIKAN ARROHIM", berkedudukan di Desa Jaring Natobang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara.
2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang :
- a. Sosial;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan dapat melaksanakan kegiatan :
- a. dalam bidang sosial, meliputi :
 1. Lembaga formal dan non formal.
 2. Panti Jompo.
 3. Poliklinik.
 4. Pembinaan Olah Raga (SSB, Atletik).
 5. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.
 6. Studi Banding.
 7. Mendirikan tempat pendidikan kursus-kursus, keterampilan dan tempat pelatihan.
 8. Mendirikan dan mengadakan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan sekolah atau pendidikan.
 - b. dalam bidang kemanusiaan, meliputi :
 1. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
 2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
 3. Memberi bantuan kepada fakir miskin dan Gelandangan.





4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.

5. Memberikan perlindungan konsumen.

6. Melestarikan lingkungan hidup.

c. dalam bidang keagamaan, meliputi :

1. Mendirikan sarana ibadah.

2. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Perguruan Tinggi.

3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah.

4. Meningkatkan pemahaman keagamaan.

5. Melaksanakan syiar keagamaan.

6. Studi Banding Keagamaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

-YAYASAN ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tahun 2002 (dua ribu dua), berdasarkan Akta Pendirian Yayasan AR RÖHIM, Nomor : 15, tertanggal 22 (dua puluh dua) Nopember 2002 (dua ribu dua), yang dibuat di hadapan Tuan INDRA SYARIF HALIM, Sarjana Hukum, selaku Notaris Kabupaten Tapanuli Selatan, pada waktu itu.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. -Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan Yayasan sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal akta ini.

2. -Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
b. Wakaf;
c. Hibah;





- d. Hibah Wasiat;-----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

3.-Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk--
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----ORGAN YAYASAN -----

-----Pasal 6 -----

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari;-----

- a. -Pembina; -----
- b. -Pengurus; -----
- c. -Pengawas; -----

----- PEMBINA -----

-----Pasal 7 -----

- 1.-Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus--
atau Pengawas.-----
- 2.-Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota--
Pembina.-----
- 3.-Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota---
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai
Ketua Pembina.-----
- 4.-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina-----
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri yayasan--
dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat--
anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang---
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.--
- 5.-Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau-----
tunjangan oleh Yayasan.-----
- 6.-Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30---
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina-----
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota-----
Pengawas dan anggota Pengurus.-----
- 7.-Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri--
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----





tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.---
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat-
(7).-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina.-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan-----
pengadilan.-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena--
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

- 1.-Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama--
Pembina.-----
- 2.-Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.---
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus
dan anggota Pengawas.-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan---
Anggaran Dasar Yayasan.-----
 - d. Pengesahkan program kerja dan rancangan-----
anggaran tahunan yayasan, dan -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau-
pembubaran Yayasan.-----
 - f. Pengesahkan laporan tahunan; -----





g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan
dibubarkan.

- 3.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula
baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- 1.-Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5-
(lima) bulan setelah akhir tahun buku, sebagai
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal
12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap
waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis
dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota
Pengurus, atau anggota Pengawas.
- 2.-Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina
secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 07 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat.
- 3.-Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari,
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- 4.-Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan atau di
tempat lain dalam wilayah hukum Republik
Indonesia.
- 5.-Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 6.-Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.





hakimannya



7. -Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

Pasal 11

1. -Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah anggota Pembina.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.-----
 - d. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 - e. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.-----
 - f. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----



7.-Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

Pasal 11 -----

- 1.-Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah anggota Pembina.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.-----
 - d. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 - e. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.-----
 - f. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----



- a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan (satu) suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan



- setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan-----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai-----
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai-----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan-----
datang.-----
 - b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan-----
Pengurus.-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan.-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan-----
anggaran tahunan Yayasan.-----
 3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam-----
Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan-----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para-----
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan-----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun-----
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut-----
tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

P E N G U R U S -----

-----Pasal 13-----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan-----
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya-----
terdiri dari:-----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Ketua, maka 1(satu) orang di antaranya diangkat-----
sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Sekretaris, maka 1(satu) orang diantaranya-----
diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1(satu) orang di antaranya-----
diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

-----Pasal 14-----





1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang----- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat,--- atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak----- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum----- tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat----- Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan----- dapat diangkat kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau----- honorarium apabila Pengurus Yayasan: -----
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak berafiliasi----- dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara----- langsung dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam----- jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus----- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan-- itu.-----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka----- dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)--- hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,----- Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk----- mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara--- Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari----- jabatannya, dengan memberitahukan secara----- tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada----- Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari----- sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,-- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga---



puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

5. Masa jabatan berakhir;

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. -Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. -Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. -Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. -Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. -Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:





- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6. -Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:
- 1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
 - 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
 - 2. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.





2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau





negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-

3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak





halaman 19 dr 39 no



memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ;
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.





Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS



Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.





6. Dalam hal terdapat pergantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir;

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran





Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina:
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat.





dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.-----





e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara absen dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan-----



keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pengawas,-----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh-----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,---
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga)-----
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi-----
mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau-----
melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan-----
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau-----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin---
oleh Ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak-
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan--
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih-
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.---

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan-
surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh-----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan-
surat kuasa.-----





3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---- dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,---- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap--- tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil-- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling-- sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota-- Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah----- anggota Pengawas.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-- 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-- pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-- 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7----- (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan----- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-- dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling--- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21--- (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat--- Gabungan Pertama.-----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak----- mengambil keputusan yang mengikat apabila----- dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua)-- dari jumlah anggota Pengawas.-----





halaman



2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

TAHUN BUKU -----

Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----



2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian yayasan dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.





2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua--- per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir--- atau yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1- tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat--- Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari----- terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang----- pertama.-----
5. Rapat pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh--- Pembina.-----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari----- jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta--- Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan--- terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan yayasan, harus mendapat----- persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi- Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut--- hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup--- diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak--- Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan--- pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas- persetujuan kurator.-----

----- P E N G G A B U N G A N -----

----- Pasal 38 -----





1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau
 - c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, keceretiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri, paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.



halaman



6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 10 (puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

2. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
3. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
4. harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;
5. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan;
6. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.





2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit,----- berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,----- pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta----- pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi----- likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk----- melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar----- atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari----- terhitung sejak tanggal penunjukan wajib----- mengumumkan pembubaran yayasan dan proses----- likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa----- Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling----- lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal----- proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil----- likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa----- Indonesia.-----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat----- 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses----- likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran----- Yayasan kepada Pembina.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan----- sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil----- likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak----- dilakukan maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi----- pihak ketiga.-----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI



1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum-- lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan---- yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur--- dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum- tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak---- diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan-- hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan-- ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud-- dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh---- Rapat Pembina.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4,--- pasal 14 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,----- Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya----- diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas--- Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----
 - a. Pembina Ketua : Doktorandus PARLUATAN SIREGAR,
| Magister Hukum tersebut;-----
 - b. Pengurus Yayasan:-----
 - Ketua : HUSIN SIREGAR, Sarjan Ekonomi-
| tersebut;-----
 - Sekretaris : ARWANDI SIREGAR; tersebut;-----
 - Bendahara : MASROITO NASUTION; tersebut;--
 - c. Pengawas Ketua : BAHARAN HARAHAP; tersebut.-----
3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan-----





tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat-----
pembina pertama kali diadakan, setelah akta-----
pendirian ini mendapat pengesahan atau-----
didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----

-Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan-----
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang-----
lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau-----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi-----
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan-----
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga-----
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua-----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan.-----

-Dari sesuatu yang tersebut diatas, maka dibuatlah:-

----- **A K T A I N I** -----

-Diperbuat sebagai minit dan dilangsungkan di-----
Padangsidempuan, pada hari, tanggal, bulan dan tahun
seperti tersebut dalam kepala akte ini dengan-----
dihadiri oleh : -----

- 1.-Tuan **ASLI ZULTAMI**, lahir di Mompang Jae, pada-----
tanggal 15 (lima belas) Oktober 1992 (seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara-----
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Notaris, bertempat-----
tinggal di Jalan Ompu Napotar Lingkungan I,-----
Desa/Kelurahan Panyanggar, Kecamatan-----
Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan.-----
- 2.-Nyonya **UNUN SARTIKA HARAHAP**, lahir di Muta-----
Godang, pada tanggal 15 (lima belas) Mei 1985-----
(seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga-----
Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Notaris,-----
bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Goti,-----





halaman 2a dari 2 halaman



Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota
Padangsidempuan.

- Keduanya sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya,
Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi maka
akte ini ditandatangani oleh penghadap, saksi
saksi dan saya, Notaris.
- Penghadap selain menandatangani akte ini juga
membubuhkan cap jempol tangan kanannya.
- Dilangsungkan dengan tanpa renvoi.
- Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya
dengan aslinya.
- Minit akte ini telah ditanda tangani sebagaimana
mesrinya.



- Padangsidempuan

(MANAHAN HARAHAP, SH, M.Kn)